

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Karakteristik Sosial Budaya

2.1.1. Pengertian kebudayaan

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang di hasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang di jadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat 2005:72).

Budaya merupakan hasil cipta, karya dan karsa manusia, berdasarkan definisi tersebut terdapat tiga komponen utama dari kebudayaan, yaitu (Koentjaraningrat 1974:15-16):

- a) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, perautan dan sebagainya (*idea*).

Merupakan wujud ideel dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau difoto. Kebudayaan ideel dapat disebut adat tata kelakuan, yang menunjukkan bahwa kebudayaan ideel itu biasanya berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

- b) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan atau perilaku berpola dari manusia dan masyarakat (*activities*).

Merupakan wujud dari sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang beriteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan lainnya dan selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan tata kelakuan.

- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (*artifact*).

Merupakan wujud dari kebudayaan fisik, dan berupa seluruh hasil fisik dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat.

Kebudayaan (arsitektur dan masyarakat) adalah produk manusia yang berakar pada fenomena eksternalisasi dan eksternalisasi tersebut di dasarkan pada kostitusi biologis manusia (Portman), yaitu kondisi organism manusia di dunia yang *built-in instability*. Manusia harus “memanusiakan dirinya“ dengan menciptakan dunianya dengan karyanya. Dengan menciptakan alat-alat

(arsitektur) ia memperkaya totalitas objek-objek fisik dunia. Alat-alat (arsitektur) tersebut setelah dihasilkan, ia segera adanya sendiri (objektifitas) sebagai faktisitas di luar diri manusia dan kadang-kadang mengkonfrontirnya, bahkan alat-alat tersebut dapat memaksakan logikanya sendiri kepada penciptanya atau pemakainya untuk bersikap, bertingkah laku, berperasaan dan berselera atau menghayati nilai tertentu. Hal ini karena karya budaya sebagai hasil *eksternalisasi* manusia telah menciptakan realitas objektif yang menyangkut : institusi, peranan dan indentitas (Budihardjo 1996 : 16-17)

Kebudayaan juga memiliki fungsi yang sangat besar dalam kehidupan manusia, Soekanto (1990:182) menyebutkan fungsi dari kebudayaan adalah untuk melindungi manusia terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia dan sebagai wadah segenap perasaan manusia.

2.1.2. Unsur-unsur kebudayaan

Koentjaraningrat (2005:80-81) menyebutkan bahwa dengan mengambil intisari dari berbagai kerangka yang ada mengenai unsur-unsur universal, unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia berjumlah tujuh buah, yang dapat disebut sebagai isi pokok dari setiap kebudayaan, yaitu:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan, yaitu sistem kepercayaan dengan segala bentuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan, yaitu adanya tatanan masyarakat yang mempunyai pola hubungan tertentu;
3. Sistem pengetahuan, yaitu hasil daya cipta, karya dan karsa manusia;
4. Bahasa, yaitu alat komunikasi yang digunakan golongan masyarakat;
5. Kesenian, yaitu berbagai bentuk produk seni;
6. Sistem mata pencaharian hidup, yaitu sistem pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan
7. Sistem teknologi dan peralatan, yaitu produk ciptaan manusia berdasarkan ilmu.

Susunan tata urut dari unsur budaya di atas dibuat dengan sengaja untuk menggambarkan unsur-unsur manakah yang paling sukar berubah atau terkena pengaruh kebudayaan lain, dan unsur-unsur manakah yang paling mudah berubah

atau diganti dengan unsur-unsur serupa dari kebudayaan-kebudayaan lain (Koentjaraningrat 1974:12).

Organisasi sosial terdiri atas organisasi yang berdiri dengan sendirinya dan organisasi yang dibentuk oleh manusia. Organisasi sosial masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Jenis-jenis keluarga sebagai organisasi sosial (Koentjaraningrat 1974: 77):

1. Keluarga *Conjugal* atau keluarga batih atau keluarga inti (*nuclear family*).
2. Keluarga *Consanguine* atau *extended family*, merupakan keluarga besar yang terdiri atas keluarga inti dan saudara dengan hubungan kekerabatan.
3. Keluarga yang diperluas dengan atau tanpa hubungan kekerabatan.
Herskowitz dalam Soekanto (1990:218) mengajukan empat unsur kebudayaan, yaitu
 1. Alat-alat teknologi;
 2. Sistem ekonomi;
 3. Keluarga; dan
 4. Kekuasaan politik.

Malinowski dalam Koentjaraningrat (1990 : 177) mengemukakan empat unsur kebudayaan yang terkenal sebagai salah satu pelopor teori fungsional dalam antropologi, yang meliputi:

1. Sistem norma yang memungkinkan terjadinya kerjasama antara anggota masyarakat.
2. Organisasi ekonomi.
3. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama.
4. Organisasi kekuatan.

Tidak ada unsur kebudayaan yang tidak mempunyai kegunaan yang cocok dalam rangka kebudayaan sebagai keseluruhan. Apabila ada unsur yang kehilangan kegunaannya, unsur tersebut akan hilang dengan sendirinya. (Malinowski dalam Soekanto 1990 : 177)

Soekanto (1990 : 183) menyebutkan bahwa setiap kebudayaan mempunyai sifat-sifat dan hakekat sebagai berikut :

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku masyarakat;
2. Kebudayaan telah ada lebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan;
3. Kebudayaan di perlukan oleh manusia dan di wujudkan dalam tingkal lakunya; dan
4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima atau ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Soekanto (1990 : 192-194) menyakatan bahwa tidak ada kebudayaan yang statis; setiap kebudayaan mempunyai dinamika, gerak tersebut merupakan akibat dari gerak masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Hal ini diebabkan karena adanya alkuturasi budaya; dengan suatu kelompok tertentu dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun di terima dan di olah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Budaya tradisional Bali merupakan perwujudan pengaturan tingkah laku umat yang dilandasi agama Hindu dengan tiga unsur kerangka dasar, antara lain:

- 1). *Tatwa* atau filsafat;
- 2). *Susila* atau etika; dan
- 3). *Upacara* atau ritual (Parisada Hindu Dharma, 1978).

Meganada (1990), menjelaskan budaya Bali tidak bisa lepas dengan nilai-nilai agama Hindu yang mempunyai tiga unsur kerangka dasar (*tatwa, susila, upacara*) bagi umatnya untuk mencapai tujuan (*Dharma*), yang disebutkan dalam *Weda*; "*Moksartham Jagadhita Ya Ca Iti Dharma*". Dalam kehidupan sehari-hari dalam pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan *tatwa, susila, upacara*, lebih mengarah pada perwujudan untuk mencapai hubungan yang harmonis manusia (*bhuana alit*) dengan Tuhan Yang Maha Esa (*bhuana agung*),

melahirkan suatu adat yang banyak mencakup aspek kehidupan berupa konsepsi-konsepsi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Swellengrebel (1960) dan Mc. Kean (1973) dalam Setyadi (2007) menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan Bali berkembang menurut beberapa tingkatan, yaitu

- a Tradisi kecil;
- b Tradisi besar; dan
- c Tradisi modern.

Masing-masing tradisi tadi memiliki ciri spesifik. Tradisi kecil yang mencakup unsur-unsur kebudayaan Bali masih tampak dalam berbagai segi kehidupan pada beberapa desa kuno di Bali pegunungan (*Bali Aga*) seperti di Desa Sembiran Kabupaten Buleleng, Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem, dan Desa Trunyan Kabupaten Bangli. Tradisi besar mencakup unsur-unsur kebudayaan yang berkembang bersamaan dengan perkembangan Agama Hindu atau unsur-unsur yang berasal dari Hindu Jawa. Tradisi besar persebarannya cukup luas pada desa-desa dataran di Bali, sedangkan tradisi modern mencakup unsur-unsur yang berkembang sejak zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan salah satunya yang berbentuk kegiatan pariwisata. Pariwisata budaya merupakan jenis kepariwisataan yang dalam pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah (Bali) yang dijiwai oleh nilai-nilai Agama Hindu sebagai potensi daerah yang paling dominan, yang di dalamnya menyiratkan satu cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan sehingga keduanya dapat meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang.

2.1.3.Latar belakang kebudayaan masyarakat Bali

Kebudayaan lahir semenjak manusia ada. Budaya merupakan produk manusia yang digunakan untuk mengatur kelangsungan hidup manusia, baik terhadap alam dan hubungan antar manusia, maka pada tahap selanjutnya segala tindakan manusia akan bergantung dan dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada dalam masyarakat di manapun manusia berada. Dalam kaitannya dengan budaya, Bali memiliki pola dan struktur tata ruang tradisional Bali seperti konsep psiko-kosmik, *Tri Hita Karana*, *Tri Angga/ Tri Mandala*, *Nawa Sanga*, *Rwa Bhineda*

dan dipadukan dengan *Asta Kosala* (ukuran dan konstruksi tempat suci), *Asta Kosali* (ukuran bangunan), *Asta Bumi* (tata ruang bangunan dan pekarangan) serta *Hala Hayuning Palemahan*. Konsep psiko-kosmik juga menjadi salah satu konsep hindu yang mempunyai pengaruh kuat dalam membentuk karakter ruang tradisional dan arsitektur Bali. Konsep psiko-kosmik adalah konsepsi Hindu-Bali yang dapat dijelaskan melalui simbolisme dunia spiritual dalam lingkup dunia fisik (*sekala*) dan hubungannya dengan dunia metafisik (*niskala*). Hindu secara luas menurut Wiana (2008) bukan agama yang hanya mengajarkan tentang kerohanian untuk mencapai *sorga* atau *moksha*. Di Bali, Hindu juga mengajarkan tentang kehidupan yang seimbang dan terpadu antara kehidupan jasmaniah (Duniawi/ *Sekala*) dan rohaniah (Spiritual/ *Niskala*). Hal ini dapat kita lihat dari penerapan sistem religi Hindu yang memotivasi umat di Bali agar membangun kehidupannya secara *sekala* dan *niskala* (Wiana, 2008).

Kebudayaan merupakan hasil hubungan manusia dengan alamnya. Kelahirannya dilatarbelakangi norma-norma agama dan dilandasi adat kebiasaan setempat. Perjalanan sejarah, sistem-sistem mata pencaharian, kemasyarakatan, religi, pengetahuan dan berbagai cabang kesenian melatarbelakangi kehidupan budaya daerah (Gelebet *et al.* 1985:19)

Kekerabatan merupakan pendekatan sistem kemasyarakatan. Masyarakat Bali terkait dalam bentuk-bentuk kekerabatan (*nyama, braya, soroh, warga*) dan bentuk-bentuk ikatan kekeluargaan lainnya yang membentuk unit kesatuan kemasyarakatan yang merupakan ikatan keturunan. Ikatan-ikatan upacara adat dalam satuan keturunan sebagai bentuk sistem kemasyarakatan terutama kehadiran bersama dalam upacara-upacara Manusia Yadnya, Pitra Yadnya, dan Dewa Yadnya (*saling sumbah*) dalam batas-batas tertentu (Parwata 2004:27)

Parwata (2004:27), menjelaskan bahwa kesatuan wilayah merupakan bentuk dari sistem kemasyarakatan yang disebut banjar dalam sub lingkungan dan desa dalam bentuk kesatuan lingkungan. Profesi masyarakat juga merupakan satuan –satuan sistem kemasyarakatan yang disebut *subak* untuk organisasi petani, untuk organisasi-organisasi lainnya sesuai minat atau hobi di sebut dengan istilah *sekeha* (dibaca : seke). Dalam komunitas masyarakat desa-desa/kota di Bali (Mulyadi 2004) terdapat tiga bentuk organisasi sosial yang cukup penting

peranannya, yaitu organisasi *subak*, organisasi *sekehe*, dan organisasi *banjar*. Ketiga bentuk organisasi tersebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas kehidupan yang dilakukan masyarakat tersebut.

Menurut Gelebet. *et al* (1985 :22-23), agama, adat dan kepercayaan, melatarbelakangi ilmu-ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan melandasi agama bila agama dianut untuk untuk stabilitas kepercayaan yang ilmiah. Jelas bahwa agama dan ilmu pengetahuan merupakan perimbangan dalam sistem religi dan pengetahuan yang harmonis. Sistem religi berpedoman pada *panca srada* sebagai pokok-pokok kepercayaan dan *panca yadnya* sebagai pokok-pokok pelaksanaan upacara keagamaan.

2.2. Tinjauan Karakteristik Pola Ruang Tradisional

2.2.1. Pengertian pola ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. (UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang) Dalam lingkup perencanaan pola ruang terbagi dua, yaitu pola ruang perkotaan dan pola ruang pedesaan.

Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang pedesaan yang terbagi ke dalam beberapa kawasan/zona, seperti : Perumahan dan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, perkantoran, terminal, wisata dan taman rekreasi, pertanian, dan lain sebagainya.

Pola tata ruang desa pada umumnya sangat sederhana, dengan kondisi lahan yang *heterogen* dan topografi yang beraneka ragam. Pola tata ruangnya sangatlah tergantung pada topografi yang ada. Secara umum pemanfaatan ruang desa dibedakan atas dua fungsi, yaitu fungsi sosial adalah untuk perkampungan

desa dan Fungsi ekonomi adalah dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi seperti, sawah, perkebunan, pertanian dan peternakan.

Eratnya hubungan antara manusia dan alam yang dilandasi tata-krama penyelarasan diri manusia sebagai *bhuwana alit* (mikro kosmos) terhadap *bhuwana agung* (makro kosmos) melahirkan 'kepekaan-kiblat'. Karena makro kosmos meliputi *Tri Loka* (3 alam): *Bhurloka* – *bhuwarloka* – *swarloka* (alam bawah – alam tengah – alam atas), maka semua yang berada di bumi harus di bagi 3 bagian (utama-madya-nista) secara bertingkat. Sebagaimana fisik manusia yang terdiri atas kepala-badan-kaki. Penerapan kepekaan tersebut dengan memperhatikan alam lingkungan, geografis dan matahari, mengasilkan hirarki tata ruang yang mengatur tata regional, tata lingkungan desa, tata bangunan, tata ruang dalam, sampai detil bangunan (Soeroto 2003:56)

2.2.2.Pola ruang tradisional Bali

Menurut Dwijendra (2003) konsep ruang masyarakat Bali adalah harmoni dan religiusitas, dimana nilai - nilai religius merupakan hal utama. Dengan menggabungkan antara konsep *Bhuana Agung* (Makrokosmos) dengan *Bhuana Alit* (mikrokosmos) sebagai suatu pendekatan dalam tata ruang yang kemudian memberikan pengertian adanya jiwa dalam penataan ruang di Bali yang dikenal dengan konsep 'Tri Hita Karana'. Selain itu ada beberapa konsep pokok lagi yang dituangkan dalam pengaturan ruang masyarakat Bali, 5 antaranya :

- 1) Konsep Rwa Bhineda memberikan orientasi yang berlawanan seperti '*Luan-Teben*' (Hulu – Hilir), '*Kaja-Kelod*' (Utara – Selatan) dan juga '*Sakral-Profan*' (Baik-Buruk);
- 2) Konsep *Tri Angga* memberikan orientasi vertikal '*Utama-Madya-Nista*';
- 3) Konsep *Tri Mandala* yang memberikan orientasi horizontal *Utama-Madya-Nista*';
- 4) Konsep *Nawa Sanga* memberikan kekuatan dan simbol pada struktur yang menggambarkan adanya pola struktur dan keterikatan antara komponen struktur; dan
- 5) Konsep Dinamika, yaitu struktur dalam kebudayaan Bali yang berkaitan dengan ruang diartikan selain memiliki pola dan keteraturan, juga memiliki sifat supel, luwes dan dinamis.

Tri Hita Karana yang secara harfiah *Tri* berarti tiga; *Hita* berarti kemakmuran, baik, gembira, senang dan lestari; dan *Karana* berarti sebab musabab atau sumbernya sebab (penyebab), atau tiga sebab/ unsur yang menjadikan kehidupan (kebaikan), yaitu *Atma* (zat penghidup atau jiwa/roh), *Prana* (tenaga) dan *Angga* (jasad/fisik) (Majelis Lembaga Adat, 1992). Dalam perumahan (tingkat desa); jiwa adalah parhyangan (pura desa), tenaga adalah pawongan (masyarakat) dan jasad adalah palemahan (wilayah desa). Pada rumah tinggal jiwa adalah sanggah pemerajan (tempat suci), tenaga adalah penghuni dan jasad adalah pekarangan. Berikut penjabaran konsep *Tri Hita Karana* dalam susunan kosmos (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. *Tri Hita Karana* dalam Susunan Kosmos

Susunan /Unsur	Jiwa/atma	Tenaga/prana	Fisik/angga
Alam semesta (Bhuana agung)	<i>Paramatman</i> (Tuhan Yang Maha Esa)	Tenaga (yang menggerakkan alam)	Unsur –unsur <i>panca maha bhuta</i>
Desa	<i>Kahyangan Tiga</i> (pura desa)	<i>Pawongan</i> (warga desa)	<i>Palemahan</i> (wilayah desa)
Banjar	<i>Parhyangan</i> (pura banjar)	<i>Pawongan</i> (warga banjar)	<i>Palemahan</i> (wilayah banjar)
Rumah	<i>Sanggah</i> (pemerajan)	Penghuni rumah	Pekarangan rumah
Manusia (Bhuana Alit)	<i>Atman</i> (jiwa manusia)	<i>prana</i>	<i>Angga</i> (badan manusia)

Sumber : Dwijendra (2003)

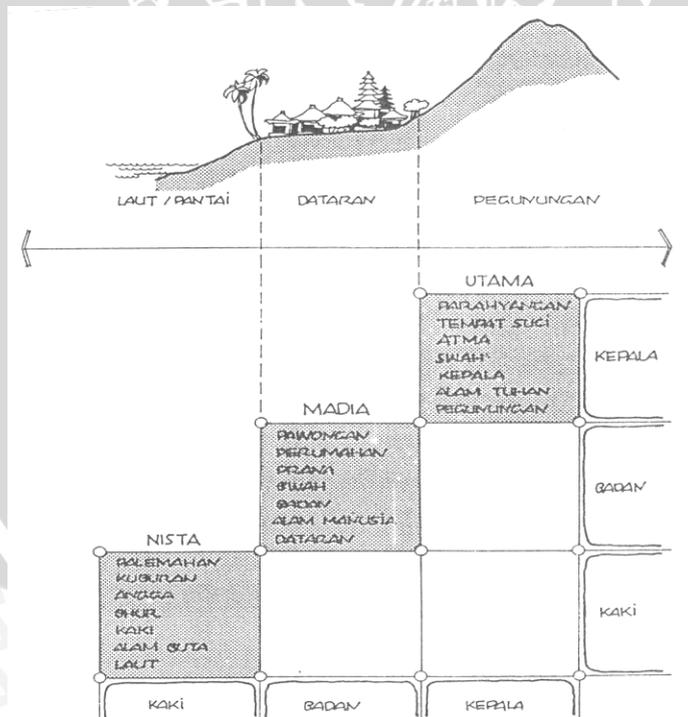
Tata ruang tradisional Bali berlaku dari lingkungan terbesar (makrokosmos) sampai ke tingkat ruang terkecil (mikrokosmos). Dalam konsep *Tri Hita Karana* : jiwa, fisik dan tenaga masing-masing disediakan ruangan seperti tempat ibadah keagamaan, tempat aktivitas kehidupan dan tempat-tempat pelayanan umum.

Tri Angga/ Tri Mandala merupakan hasil dari konsep psiko-kosmik dan menjadi aplikasi bentuk *Tri Hita Karana*. *Tri Angga/ Tri Mandala* merupakan pembagian ruang berdasarkan kualitasnya, yaitu *utama mandala* (zona sakral/suci), *madya mandala* (zona netral), dan *nista mandala* (zona kotor). Konsep *Tri Mandala* pada dasarnya merupakan sistem pembagian area dalam usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan manusia lain dan dengan lingkungannya. Dalam lingkup permukiman, *utama mandala* adalah

tempat suci/sakral, *madya mandala* adalah permukiman, dan *nista mandala* adalah makam/kuburan. Dalam lingkup wilayah, pembagiannya berturut-turut menjadi gunung, daratan dan laut (Samadhi 2004 : 24).

Masyarakat Bali yang memiliki konsep *Segara-Gunung* (laut-gunung) sangat menghormati keberadaan laut dan gunung. Laut bagi masyarakat Bali merupakan tempat untuk menyucikan segala kekotoran yang ada di bumi, tempat mengembalikan segala sesuatu yang bersifat duniawi, sementara gunung merupakan tempat yang dianggap suci (istananya para dewa) dan tempat asal semua kehidupan.

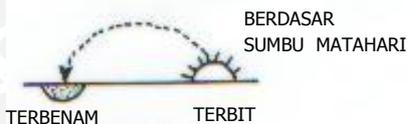
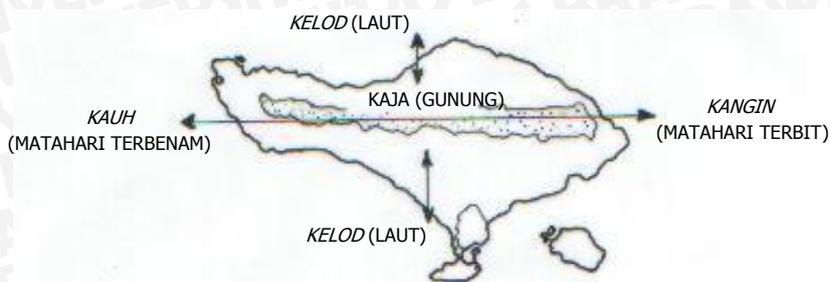
Orientasi dalam tata ruang tradisional Bali (Parimin 1986) dibedakan menjadi dua, yaitu *kangin-kauh* (timur-barat) sebagai sumbu religi dan *kaja-kelod* (utara-selatan) sebagai sumbu bumi. Berdasarkan sumbu-sumbu tersebut, arah *kaja* (utara) dan *kangin* (timur) memiliki nilai utama, tengah memiliki nilai *madya* dan arah *kelod* (selatan) dan *kauh* (barat) memiliki nilai *nista*. Konsepsi Tri Angga dan Tri Hita Karana maupun konsepsi Tri Angga di Bali memiliki kedudukan sebagai konsep hirarki ruang (Gambar 2.1, Gambar 2.2 dan Gambar 2.3).



Gambar 2.1 Konsepsi Tri Angga/Tri Mandala dan Tri Hita Karana.

Sumber : Eko Budihardjo dalam Wiryantini (2005:33)

KONSEPSI ARAH ORIENTASI RUANG



SANGA MANDALA

UTAMANING NISTA	UTAMANING MADYA	UTAMANING UTAMA
MADYANING NISTA	MADYANING MADYA	UTAMANING MADYA
NISTANING NISTA	NISTANING MADYA	UTAMANING NISTA

BERDASAR SUMBU KAJA KELOD (GUNUNG LAUT)

Gambar 2. 2 Konsep Arah Orientasi Ruang dan Konsep Sanga Mandala

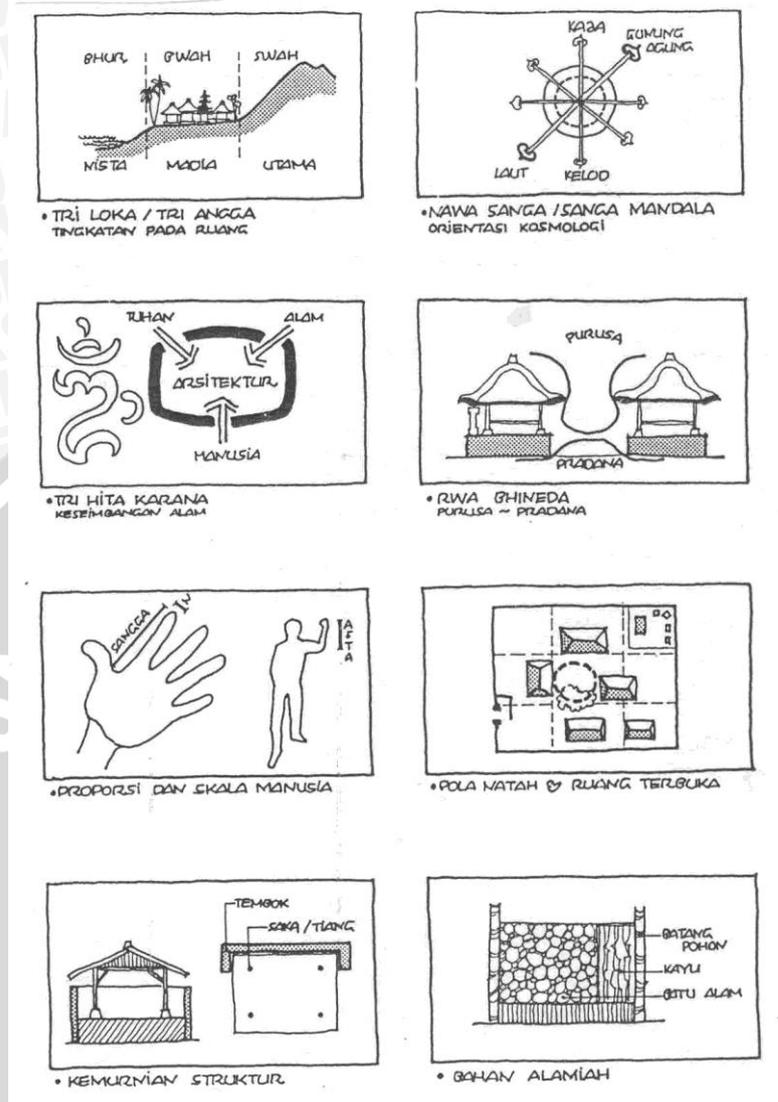
Sumber: Eko Budihardjo (1986).

TRI LOKA	SHUAH LOKA	BHUAH LOKA	BHUR LOKA
TRI ANGGA	UTAMA	MADYA	NISTA
1. Semesta	Atmosfir	Litosfir	Hidrosfir
2. Bumi/ Dunia	Gunung (Untuk Dewa)	Tanah (Untuk Manusia)	Laut (Untuk Keburukan)
3. Desa/ Kota	Pura	Banjar	Kuburan
4. Rumah	Parahyangan/ Pamerajan/ Sanggah	Pawongan/ Natah	Palemahan/ Lebu
5. Pura	Jero	Tengah	Jaba

Gambar 2.3 Konsep *Tri Angga*, sebagai konsep hirarki ruang.

Sumber: Eko Budihardjo (1986: 50)

Konsep *Rwa Bhineda*, *Tri Loka/ Tri Angga* sampai konsep *Nawa Sanga* lebih menggambarkan pola struktur dan keterkaitan antar komponen struktur. Konsep *Rwa Bhineda* memberikan orientasi (yang disebut *luan-teben*, *kaja-kelod*) dan juga *laxokeroni* (*sacred-profane*, baik-buruk). *Tri Angga* memberikan penjenjangan dan nilai terhadap struktur: *nista*, *madia*, *utama*. *Nawa sanga* memberikan kekuatan dan simbol terhadap struktur yang merupakan hasil kombinasi konsep *Tri Hita Karana*, *Tri Angga* dan arah orientasi ruang (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Konsep yang melandasi pola tata ruang tradisional Bali.

Sumber: Eko Budihardjo dalam Wiryantini (2005:36)

Desa adat di Bali berdasarkan Perda Bali Nomor 3 Tahun 2001 mempunyai pengertian sebagai “...Kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu Bali secara turun-temurun dalam ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Konsep *Tri Angga/ Tri Mandala* membagi ruang menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

A. *Utama mandala*

Utama mandala dalam konsep Tri Mandala, adalah ruang yang khusus diperuntukkan bagi bangunan suci/ pura, dan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Fungsinya adalah tempat melakukan hubungan dan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa/ *Ida Sang Hyang Widhi Waca*.

Batas zona *utama mandala* ini dapat menggunakan radius kesucian pura yang dimaksudkan untuk menjaga wilayah pura dari berbagai perbuatan dan aktivitas yang tidak suci. Ukuran-ukuran radius kesucian pura secara tradisional seperti *apenimpug* (sejauh lemparan) atau *apanyengker* (seluas pagar pura) untuk pura desa, *apaneleng alit* (pandangan pendek) untuk *Dhang Kayangan* dan *apaneleng agung* (pandangan jauh) untuk *Sad Khayangan*. Untuk menyeragamkan ukuran tersebut dan menyesuaikan dengan ukuran internasional, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 11/KEP/I/PHDIP/1994 tentang *Bhisama Kesucian Pura* dengan memberikan batasan mengenai ukuran tersebut, yakni untuk *Pura Sad Khayangan* dipakai ukuran *Apaneleng Agung* (minimal 5 Km dari Pura), untuk *Dang Khayangan* dipakai ukuran *Apaneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura), dan untuk *Khayangan Tiga* dan lain-lain dipakai ukuran *Apenimpug* atau *Apenyengker*.

B. *Madya mandala*

Madya mandala dijabarkan sebagai ruang yang dialokasikan untuk kepentingan aktivitas manusia termasuk fasilitas umum di dalamnya sebagai wujud hubungan dan interaksi bersama antar sesama manusia. *Madya mandala* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata ruang yang dialokasikan untuk kepentingan aktivitas pengunjung termasuk fasilitas pelayanan yang terdapat di dalamnya.

C. *Nista mandala*

Nista mandala merupakan ruang yang mempunyai tingkatan paling kotor, dan dalam pembahasan ini *nista mandala* ditekankan pada pembuangan/ akhir dari segala aktivitas manusia.

Samadhi (2004) memberikan tiga buah kesimpulan yang harus selalu diperhatikan di dalam pembangunan fisik di Provinsi Bali berdasarkan Konsep *Tri Hita Karana* di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Desain tata ruang harus selalu memperhitungkan konsep dari ketradisional dan kerelegiusan masyarakat Hindu Bali sebagai dasar dari segala permulaan desain pembangunan tata ruangnya. Hubungan antara konsep Mikrokosmos dan Makrokosmos adalah inti dari semua itu, sehingga konsep tata ruang yang biasa diaplikasikan di kota kota seperti Jakarta, Melbourne dan lainnya harus segera disingkirkan. Publik akhirnya dapat melihat, pembangunan tata ruang Bali tak mungkin akan lepas dari konsepnya sendiri yang menjadi ciri khas, yang mampu mengharmoniskan manusia dan lingkungannya sedemikian rupa di dalam ciri khas Hindu Bali.
2. *Tri Hita Karana* adalah falsafah utama yang membentuk konsep psiko-kosmik dari harmoni keseimbangan di antara mikrokosmik (penduduk), Makrokosmik (Lingkungan biotik dan abiotik penduduk), dan Sang Penciptanya.
3. Falsafah religius tradisi tata ruang Bali di atas dapat lebih mudah diaplikasikan ke dalam desain tata ruang dengan hanya mengingat urutannya berdasarkan yang terpenting, yaitu 1) Falsafah Psiko-kosmiknya; 2) *Tri Hita Karana*; 3) *Tri Angga*; 4) *Kaja-Kelod*; 5) *Kangin-kauh*; 6) *Sanga Mandala*; dan 7) *Adat lokal (Tri Pramana dan Tri Masa)*.

2.3 Falsafah dan Konsep Bermukim Masyarakat Bali

Alit (2004:58-59) menyebutkan bahwa falsafah dan konsep bermukim masyarakat Bali memiliki ciri khas tersendiri yang dapat di jelaskan pada keterangan berikut :

2.3.1.Falsafah bermukim masyarakat Bali

Falsafah hidup masyarakat Bali didasarkan atas agama (Hindu) yang terdiri dari *tattwa*, *susila*, *upacara*. Falsafah (*tattwa*) sebagai lapisan yang paling dalam dari agama Hindu berasal dari kata “*tat*” artinya itu, dan “*twa*” artinya hakekat atau sifat. Kata *tattwa* berarti hakekat atau sifat itu, atau bersifat hakekat

(Majelis Pembinaan Lembaga Adat, dalam Alit, 2004:58). Pemahaman falsafat (*tatwa*) dilakukan untuk dapat lebih memahami pengetahuan kebenaran yang didalam ilmu pengetahuan disebut filsafat. Filsafat dipelajari dengan kemampuan ratio dan intuisi sampai kebenaran dapat dirasakan. Menurut *tattwa* dalam wujud tunggalnya, Tuhan (*Hyang Widhi*) itu terdiri atas *cetana* (*purusa*) dan *acetana* (*pradana*), yang merupakan benih unsur-unsur kejiwaan dan benih unsur-unsur kebendaan. *Cetana*, benih unsur-unsur kejiwaan yang memberikan kesadaran atau kekuatan hidup hukum alam beserta isinya, dan *paratma-atma* sebagai sumber hidup. *Acetana*, adalah hukum kodrat yang memberi hidup dan yang menyebabkan segala sesuatu dalam alam semesta menjadi ada dan bergerak. Terwujudnya alam ini adalah hasil bersatunya *cetana* dan *acetana*, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Ia langgeng dan abadi.

Dalam Majelis Pembinaan Lembaga Adat dalam Alit (2004:58), secara filosofis, alam semesta ini diciptakan melalui suatu proses yang terdiri dari unsur *panca tan matra*. Unsur-unsur ini muncul dari benih pada materi (*prakerti*), dan *prakerti* itu muncul dari *pradana tattwa* yaitu kekuatan magis dari *Hyang Widhi*. *Panca tan matra* terdiri dari *gandhatanmatra*, *rasatanmatra*, *rupatanmatra*, *sparsatanmatra*, dan *sabdatanmatra*. Kelima unsur tersebut secara evolusi berubah menjadi unsur-unsur benda yang disebut *panca maha bhuta* yang terdiri dari: *pratiwi* (unsur zat padat), *apah* (unsur zat cair), *teja* (unsur sinar), *bayu* (unsur udara), *akasa* (unsur ether). *Panca maha bhuta* itulah yang menjadi bahan alam, dan juga menjadi bahan jasmani atau badan wadah makhluk hidup

Paparan di atas menggambarkan pemahaman filsafat sebagai pandangan hidup yang memiliki nilai hakiki. Bagi masyarakat Bali (Hindu) cerminan filsafat selalu diusahakan dalam *berbhuna* termasuk mewujudkannya dalam pola-pola permukiman adat Bali. Pengertian *berbhuna* tersebut sebagai usaha bagaimana mendudukan diri manusia (*bhuana alit*) memiliki hubungan harmonis dengan alam (*bhuana agung*).

2.3.2. Konsep bermukim masyarakat Bali

Konsep bermukim masyarakat Bali adalah harmoni dan religiusitas, dimana nilai-nilai religius merupakan hal utama. Seluruh emosi keagamaan dalam perilaku kehidupannya diaplikasikan dalam wadah sebagai tempat bermukim.

Dengan berpegang pada kepercayaan (*srada*) dan pengorbanan suci (*yadnya*) yang setiap harinya menampilkan kehidupan yang penuh religius. Nilai religius terkandung dalam religi dan simbol, dan hal tersebut dapat dilihat dalam hubungannya dengan manifestasi Tuhan (*Hyang Widhi*) dalam berbagai penjuru alam. yang merupakan simbol religi yang menggambarkan manifestasi Tuhan dalam wujud *bhatara* lengkap dengan atribut serta *saktinya*, senjata, warna, urip serta posisinya di alam semesta menurut arah mata angin.

Simbol ini dalam bermukim merupakan pedoman dalam bersikap dan mewujudkan wadah sebagai tempat bermukim dengan mendudukkan sakral dan profan secara benar. Secara fisik orientasi ke arah sakral dilakukan dari tata cara menyusun pola tata ruang, tata bangunan sampai penggunaan bahan bangunan. Misalnya, arah timur laut (*kaja kangin*) tempat stananya *Bhatara Sambu* dengan *saktinya Mahadewi*, merupakan orientasi yang sakral (*utamaning utama*). Tuhan dalam manifestasinya sebagai *Bhatara Tri Sakti* (Brahma, Wisnu, Siwa) yang bermakna religius menggambarkan manifestasi kekuatan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, pelebur yang secara fisik manifestasiNya di stanakan pada tiga tempat suci dalam wilayah desa berupa Pura Tri Khayangan (Puseh, Desa, Dalem). Dalam pola bermukim, prinsip-prinsip hirarkhi ruang memaknai tempat-tempat yang disucikan (sakral) berlaku menyeluruh. Menurut Alit (2004) dalam menata lingkungan dari unit terkecil (*umah*), perumahan (*pawongan*), tempat bermukim (desa *pakraman*) sampai tingkat regional Bali diatur secara berjenjang yang secara hirarkhis tersusun dalam katagori tiga-tiga bertingkat (*utama, madya, nista*).

2.3.3. Morfologi pola permukiman desa

Alit (2004:102-106) menyatakan bahwa morfologi pola mukiman desa di Bali dapat di jelaskan pada keterangan berikut :

Ditinjau dari posisi pola mukiman secara umum, mukiman yang mengalami perubahan kecil adalah di daerah perdesaan terutama pada desa-desa tradisional. Hal ini karena adanya pandangan masyarakat tentang nilai sakral dan profan, dan makin ke arah hulu (*luan*) memiliki nilai utama yang selalu diusahakan dan dipertahankan.

Morfologi desa-desa adat di daerah perdesaan dipicu dengan adanya sarana dan prasarana lingkungan yang memberikan arah morfologi cenderung

mengikuti keberadaan prasarana, sehingga menimbulkan morfologi bersifat menyebar atau mengikuti jalan (*ribbon*). Disamping itu terdapat usaha mengadatkan dengan duplikasi fungsi, dan bila tidak memungkinkan akan mencari lokasi yang cenderung tidak mengikuti pola-pola permukiman adati Bali.

Morfologi pola-pola permukiman adati pada daerah urban cenderung melenyapkan pola-pola tradisinya yang telah ada. Morfologi yang terjadi pada unit-unit hunian cenderung mengalami perubahan pada orientasi masa bangunan sebagai akibat kebutuhan baru dan keterbatasan lahan. Kendatipun demikian orientasi *luan* dan *teben* masih merupakan pilihan-pilihan yang selalu diusahakan.

Pada daerah urban seringkali muncul lingkungan kumuh (*slum area*) sebagai akibat pembangunan pada lahan kontrakan atau lahan ilegal seperti bantaran sungai, maupun pembangunan yang menyerobot tanah milik negara sehingga terjadi morfologi yang tak sesuai dengan norma-norma permukiman adati Bali.

2.4 Desa Adat Di Bali

Desa sebagai suatu bentuk permukiman tradisional, yang merupakan batas lingkungan teritorial secara bentuk dan struktur di Bali dibedakan menjadi dua, yaitu (Suprpto *dalam* Pola Permukiman Pedesaan Daerah Bali, 1982) sebagai berikut :

1) Desa Adat

Merupakan suatu kasatuan wilayah kemasyarakatan dalam kaitan pelaksanaan adat istiadat, kolektifitas dan konsepsi upacara keagamaan. Desa adat dikepalai oleh *kelian adat* atau sering pula disebut *bendesa adat*. Pemilihan dilakukan secara musyawarah oleh anggota desa adat yang lazimnya disebut *krama desa* untuk kurun waktu jabatan tertentu, bahkan tidak terbatas.

2) Desa Dinas

Merupakan satu kesatuan wilayah administratif yang berada setingkat di bawah kecamatan. Sering pula disebut desa administratif. Di Bali desa dinas disebut dengan *perbekelan* atau *kebendesaan*. Desa dinas dikepalai oleh seorang kepala desa yang disebut *perbekel* atau *bendesa*. Karena ia menyangkut aspek administratif kedinasan, jabatan seorang *perbekel*

terbatas waktunya, dan selanjutnya dipilih secara demokratis penggantinya yang lain.

Secara struktur keduanya tidak mempunyai hubungan kerja, walaupun dalam mekanisme kerjanya seringkali terjadi saling isi mengisi. Batasan tentang desa adat dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1986 pada pasal 1 huruf e sebagai berikut :

“Desa adat sebagai *Desa Destra* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun menurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

2.4.1.Ciri – ciri desa adat

Bagus (1994), suatu komunitas atau organisasi tradisional di Bali dapat diidentifikasi sebagai suatu desa adat apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut :

1. Desa adat biasanya mempunyai batas – batas geografi yang jelas, yang umumnya berupa batasan alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit, dan pantai ataupun batas buatan seperti tembok *penyengker* (pembatas);
2. Mempunyai *krama* (anggota) yang jelas, dengan persyaratan tertentu dan sebagian besar krama desa adat berdomisili di wilayah desa adat yang bersangkutan;
3. Mempunyai Kahyangan Tiga atau kahyangan Desa, atau pura lain yang mempunyai fungsi dan peranan sama dengan Kahyangan Tiga. Hal ini perlu ditegaskan karena banyak desa adat, Pura Desa dan Pura Puseh ada dalam satu kompleks, sehingga seakan-akan hanya merupakan satu pura. Bahkan ada desa adat yang ketiga Kahyangan Tiga-nya ada dalam satu kompleks;
4. Mempunyai otonomi, baik ke luar maupun ke dalam. Otonomi ke dalam berarti kebebasan atau kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sedangkan otonomi ke luar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi di luar desa adat; dan

5. Mempunyai suatu pemerintahan adat, dengan kepengurusan (*prajuru adat*) sendiri yang berlandaskan kepada peraturan-peraturannya sendiri (*awig-awig*), baik tertulis maupun tidak tertulis.

2.4.2. Peranan desa adat

Sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Desa Adat (Perda No. 06/1986), ditegaskan bahwa desa adat merupakan kesatuan hukum masyarakat hukum adat yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dari kedudukan gandanya ini, kemudian desa adat ditentukan fungsinya sebagai berikut:

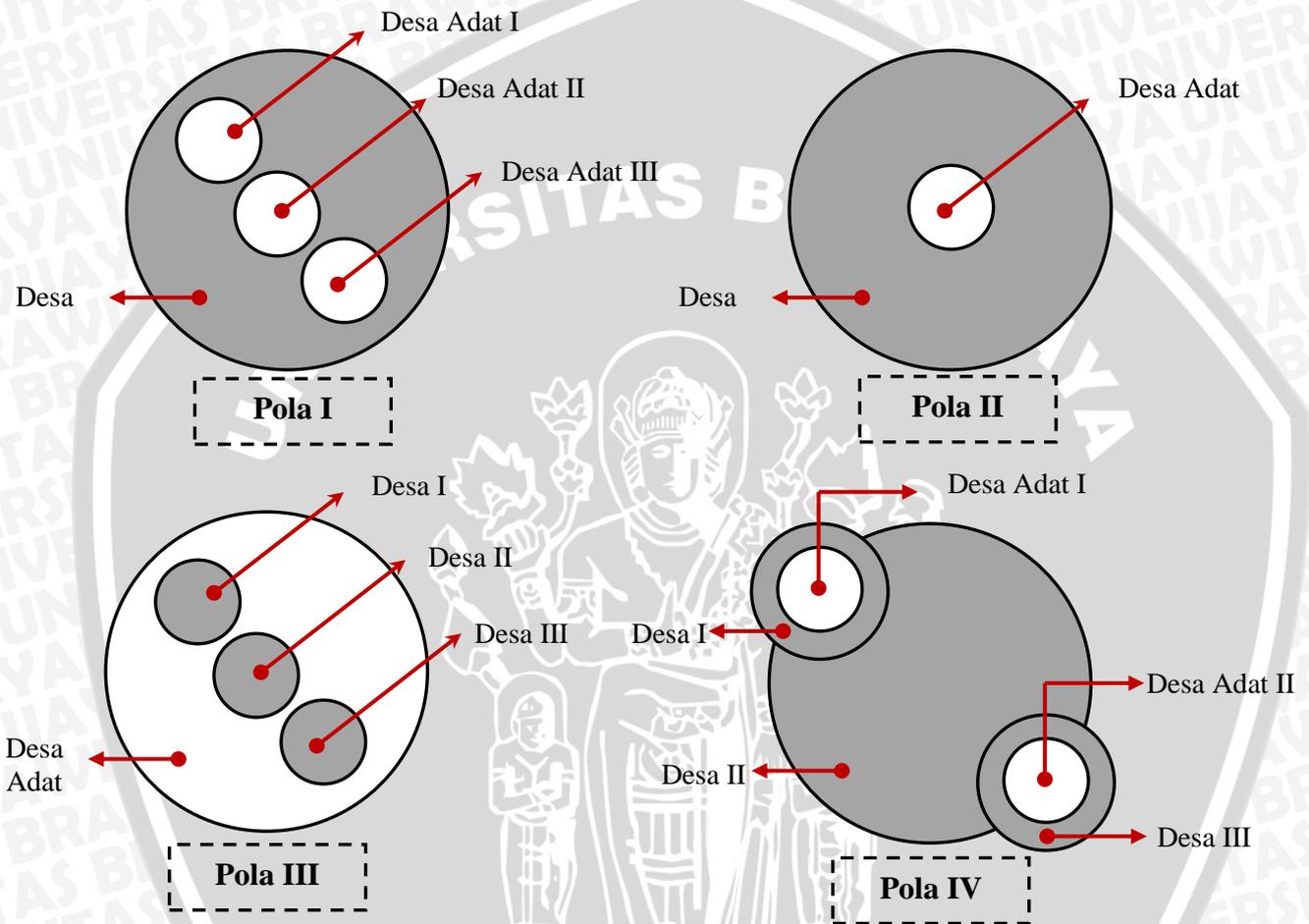
1. Membantu pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam kelancarannya dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan;
2. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat dalam desa adat;
3. Memberikan kedudukan hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan;
4. Membina dan mengembangkan kebudayaan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya, berdasarkan *paras paros salunglung sabayantaka*/musyawarah untuk mufakat; dan
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

2.5 Pola Desa Adat di Bali

Secara otonomi berdasarkan hukum adat yang ada di Bali dan sering disebut sebagai *Awig – awig adat*, desa adat mempunyai identitas, eksistensi, peranan dan kewajiban yang sama yang dibangun atas dasar ‘Konsep Tri Hita Karana’. Konsep tersebut terdiri dari beberapa unsur, yaitu *parahyangan* (sebagai wujud tempat persembahyangan kepada TYME), *pawongan* (warga desa/*krama desa adat*), *palemahan* (wilayah desa).

Menurut Dwijendra (2003), wilayah desa – desa di Bali biasanya mempunyai pola perwilayahan yang tidak seragam, baik wilayah desa maupun desa adat. Hal ini didasarkan pada konsep *Desa Kala Patra* yang dianut dalam ajaran Hindu di

Bali. Konsep 'kala' (waktu) menunjuk pada segi waktu atau saat membangun, khususnya menyangkut hari baik (*dewasa ayu*) dan hari buruk. Sedangkan konsep 'patra' (keadaan) terkait dengan situasi yang diharapkan, biasanya berupa norma-norma yang tertuang serta pada dasarnya memiliki tujuan tercapainya kehidupan yang selaras, seimbang dan serasi dengan alam (Gambar 2.5).



Gambar 2.5 Pola desa adat di Bali

Sumber : Dwijendra, (2004)

Keterangan :

- Pola I : Satu desa mencakup beberapa desa adat;
- Pola II : Satu desa terdiri dari satu desa adat;
- Pola III : Satu desa adat terdiri dari beberapa desa; dan
- Pola IV : satu desa adat terbagi ke dalam beberapa desa.

2.6 Tipologi Perdesaan Di Bali

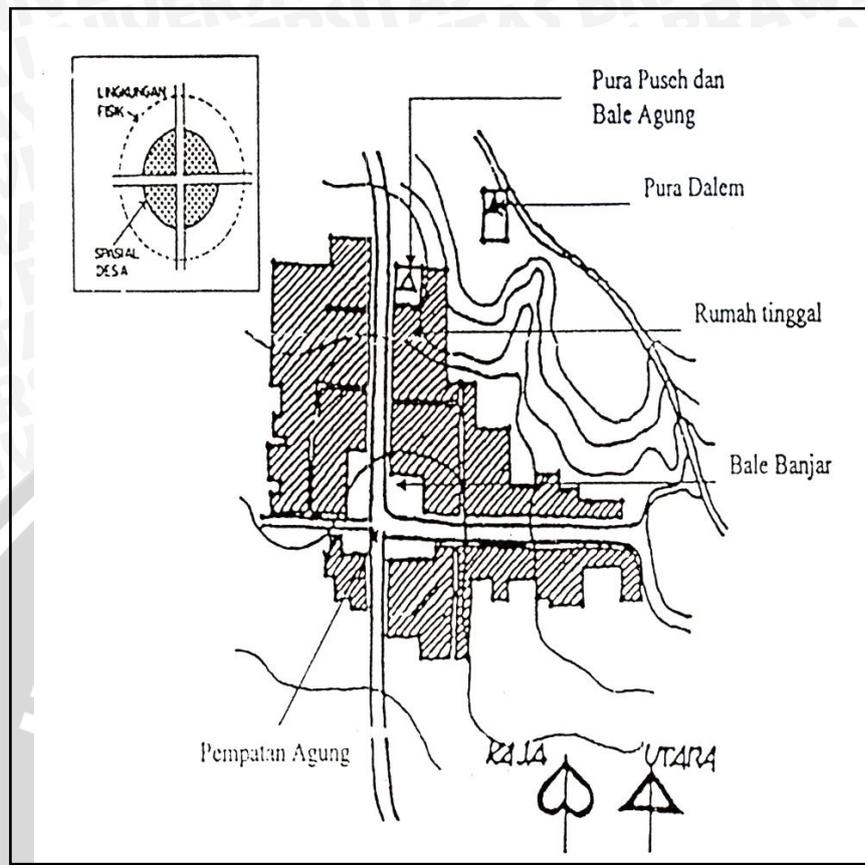
Menurut Gelebet, *et al.* (1985), pola – pola perkampungan di Bali umumnya dipegaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor tata nilai ritual yang menempatkan zona sakral di bagian *kangin* (timur) arah terbitnya matahari sebagai arah yang diutamakan, faktor kondisi dan potensial alam, nilai utama pada arah gunung dan ke arah laut dinilai lebih rendah dan faktor ekonomi yang berpengaruh pada pola perkampungan.

Desa – desa di Bali secara umum dibedakan menjadi dua tipe, yaitu desa Bali Pegunungan (Bali Aga) dengan pola desa yang khusus dan Desa Bali Dataran dengan pola *pempatan agung* (Runa dalam Parwata 2004). Bali Pegunungan (Bali Aga) sebagian besar terletak pada daerah pegunungan di bagian tengah Pulau Bali. desa – desa tersebut umumnya lebih tua dan jumlahnya lebih sedikit tetapi memiliki variasi fisik lebih banyak dibandingkan desa Bali Dataran. Salah satu tipe desa Bali Pegunungan adalah Desa Tenganan yang terletak di Kabupaten Karangasem.

Desa Bali dataran adalah tipe desa yang muncul belakangan atau lebih muda, kebanyakan terletak di daerah dataran Bali selatan. Tipe ini merupakan tipe desa terbanyak di Bali, tetapi memiliki variasi fisik lebih sedikit dibandingkan desa Bali Pegunungan.

2.6.1. Desa Bali dataran.

Secara fisik, Desa Bali Dataran bercirikan adanya dua jalan utama yang menyilang desa (timur – barat dan utara – selatan) serta membentuk pusat desa pada pertemuannya. Tipe desa ini juga biasa disebut tipe *pempatan agung*. Disekitar perempatan itu biasanya ada *Bale Banjar*, Pura Desa, dan rumah keluarga bangsawan atau Puri. Perpotongan dua jalan tersebut menyebabkan adanya empat sudut/empat zona, yaitu *kaja-kangin* (Timur Laut), *kelod-kangin* (Tenggara), *kelod kauh* (Barat Daya), dan *kaja kauh* (Barat Laut) (Gambar 2.6).



Gambar 2.6 Ciri – ciri fisik desa Bali Dataran.

Sumber : Parwata (2004)

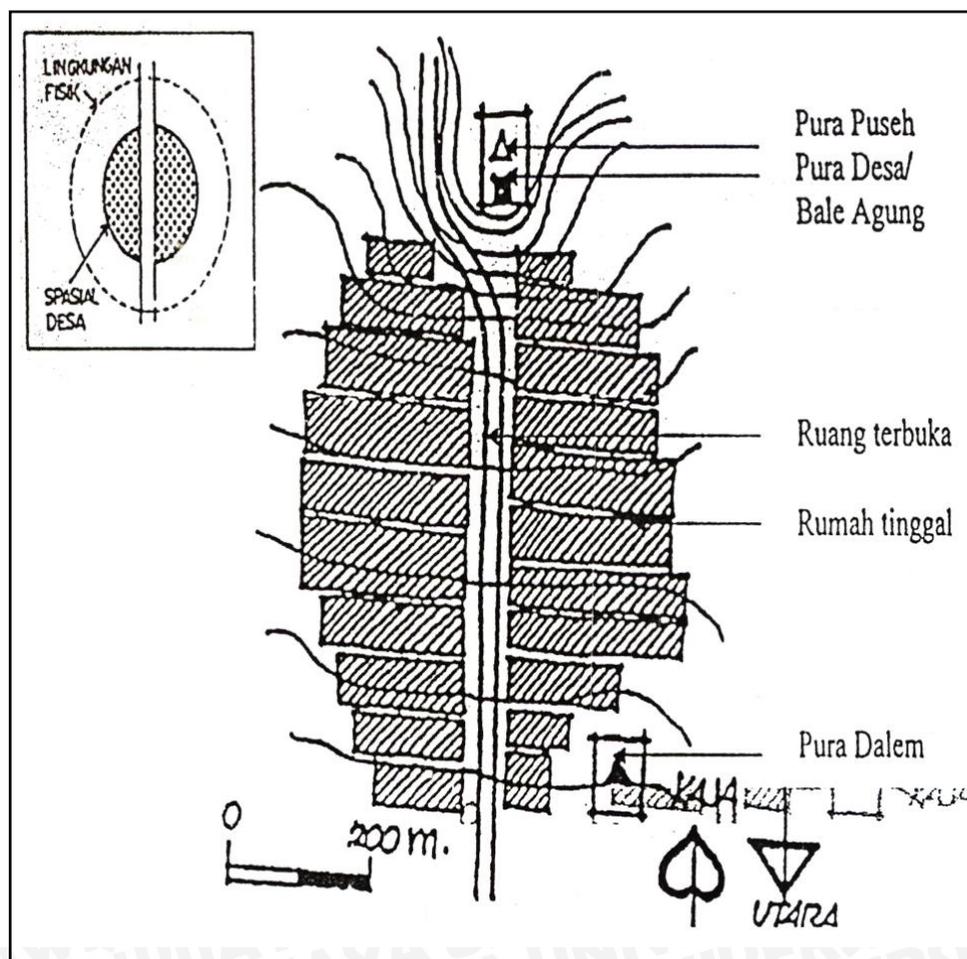
Menurut Meganada *dalam* Parwata (2004) pola *cross road* merupakan persilangan dari dua jalan yang terdiri dari sumbu, yakni sumbu jalan utara-selatan (poros bumi) dan sumbu jalan timur – barat (sumber kehidupan). Dalam arsitektur tradisional Bali pola *cross road* disebut pola *catus pata*, yaitu tempat bertemunya pengaruh yang datang dari empat penjuru mata angin. Pada titik pusat inilah menjadi awal dari terbentuknya sebuah desa di Bali.

2.6.2. Desa Bali pegunungan (Bali Aga).

Secara geografis, desa –desa pegunungan Di Bali memiliki wilayah yang sangat luas dengan bentuk yang tidak beraturan. Sebagian besar wilayah tersebut terdiri atas tanah tegalan, hutan, dan persawahan, sehingga mata pencaharian mereka masih mengikuti pola agraris. Menurut Runa *dalam* Parwata (2004), desa pegunungan juga cenderung menempatkan sistem pengairan di bawah

pengawasan desa, meskipun sistem pengairan itu berkembang sampai di luar batas desa.

Ciri utama fisik Desa Bali Pegunungan (Parimin dalam Parwata 2004) adalah ruang terbuka cukup luas yang memanjang (linier) dari arah utara menuju selatan (*kaja-kelod*), yang membagi desa menjadi dua bagian. Pada posisi yang diametral, yakni pada ujung utara (*kaja*) terletak Pura Puseh (tempat pemujaan untuk Dewa Wisnu, yaitu Dewa Penciptaan), di tengah sebagai tempat Pura Bale Agung (tempat pemujaan untuk Dewa Brahma), dan pada arah selatan (*kelod*) terletak Pura Dalem (tempat pemujaan untuk Dewa Siwa). Fasilitas umum atau infrastruktur berada di tengah desa dan hunian penduduk berada pada sisi kiri dan kanan jalan utama desa (Gambar 2.7).



Gambar 2.7 Ciri – ciri fisik Desa Bali Pegunungan

Sumber : Parwata (2004)

2.7 Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional

Tata ruang yang dimaksudkan adalah aturan penempatan ruang-ruang menurut fungsi yang tertentu yang diberikan terhadap fungsi tersebut sesuai dengan tata karma ajaran agama Hindu di Bali. Seperti telah diungkapkan di atas bahwa ruang dalam tradisional Bali dilandasi oleh Konsep *Tri Hita Karana* dalam *Tri Angga*-nya, yaitu zona yang di peruntukan untuk *parahyangan* sebagai kepalanya, zona yang diperuntukan untuk hunian sebagai sebagai badanya dan zona yang diperuntukan untuk *palemahan* sebagai kakinya. Secara rinci berikut ini akan diuraikan tentang ruang, tata nilai peruntukannya dalam rumah tradisional Bali, yaitu sebagai berikut (Parwata 2004:72:80)

1. Zona parahyangan

Terletak pada bagian timur laut (untuk Bali bagian selatan), atau pada tenggara (Bali bagian utara) dari letak pekarangan suatu rumah tradisional Bali. Zona ini diberi nilai utama, yang khusus untuk bangunan (*pelinggih*) untuk persembahyangan kepada roh leluhur.

2. Zona hunian/pawongan

Pada zona hunian ini terletak bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai wadah hunian, yaitu *Bale Daje*, *Bale Daging*, *Bale Dauh*, *Pawon* (dapur), *Gelebeg*. Bangunan lainnya yang ada dalam zona hunian adalah bangunan “*penunggun karang*”, yang berfungsi sebagai bangunan spiritual, demikian juga bangunan *pelinggih surya*.

3. Zona lebu

Pada zona ini terdapat *angkul-angkul* dan *tembok penyengker* serta *telajakan*.

2.8 Studi-Studi Terdahulu

Penulisan studi mengenai Perubahan Pola Ruang Tradisional Desa Tigawasa, Buleleng – Bali ini mengacu pada studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adanya studi-studi terdahulu tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan perbandingan dalam proses identifikasi dan analisis yang terkait dengan wilayah studi (Tabel 2.2).

2.9 Kerangka Teori

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan dapat disusun kerangka teori yang berisi mengenai teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam Pola Ruang Tradisional Desa Tigawasa, Buleleng – Bali (Gambar 2.8).

2.10 Definisi Desa di Bali

Desa – desa di Bali secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu desa Bali Kuno atau juga dikenal dengan istilah Desa Bali Aga, Desa Bali Mula dan Desa Pegunungan serta Desa Bali Sekarang atau dikenal dengan sebutan Bali Majapahit dan Bali Dataran (Gambar 2.9).



Tabel 2.2 Studi-studi Terdahulu terkait dengan Pola Ruang Permukiman Tradisional Bali Aga Desa Tigawasa Buleleng Bali

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Materi	Metode	Lokasi	Manfaat Penelitian	Perbedaan dengan Studi ini
1	Morfologi Pola Mukiman Adati Bali. I Ketut Alit, Dosen Fakultas Teknik Arsitektur, Universitas Udayana dalam Jurnal Permukiman Natah Tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Falsafah dan konsep bermukim masyarakat Bali • Pola mukiman adati Bali di tinjau dari regional, pola Desa dan unit-unit hunianya • Morfologi pola permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Desriptif 	Beberapa desa di Provinsi Bali, yaitu Desa Bug-bug, tenganan, Pengotan, Truyan, Julah, Kedonganan, Benoa, Kusamba, Tulamben, Pengastulan, Pengambengan, Cupel, Antosari, Sudiarma dan Puncak Gede	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya konsep bermukim masyarakat Bali • Teridentifikasinya pola mukiman adati Bali • Teridentifikasinya morfologi pola permukiman Bali 	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum perbedaan dengan Pola Ruang Permukiman Tradisional Bali Aga Desa Tigawasa Buleleng Bali Pada lokasi wilayah studi pada penelitian yang di lakukan Alit tidak hanya mencakup desa Bali aga.
2	Pelestarian Pola Tata Ruang Tradisional Desa Adat (Pakraman) Kalibukbuk di Kawasan Pariwisata Lovina Kabupaten Buleleng, Bali. Putu Agus Wiryawan Giri dalam Skripsi Sarjana Universitas	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik sosial budaya dan pola tata ruang tradisional desa Adat (pakraman) Kalibukbuk di kawasan pariwisata Lovina • Perubahan sosial budaya dan pola tata ruang tradisional desa Adat (pakraman) Kalibukbuk di kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Desriptif Dan Analitis 	Desa ada (pakraman) Kalibukbuk Kabupaten Buleleng, Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Tridentifikasinya karakteristik sosial budaya dan tata ruang Desa Adat Kalibukbuk yang meliputi: sejarah desa adat, letak geografis dan administrasi, sistem pemerintahan, tata guna lahan, karakteristik kehidupan sosial budaya masyarakatnya serta sarana dan prasarana yang 	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan dengan studi saat ini yaitu Ruang Permukiman Tradisional Bali Aga Desa Tigawasa Buleleng Bali terdapat pada tema dan focus wilayah studi

Lanjutan Tabel 2.2 Studi....

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Materi	Metode	Lokasi	Manfaat Penelitian	Perbedaan dengan Studi ini
	Brawijaya Tahun 2008	pariwisata Lovina <ul style="list-style-type: none"> • Arahan pelestarian sosial budaya dan pola tata ruang tradisonal desa Adat (pakraman) Kalibukbuk di kawasan pariwisata Lovina. 			terdapat di Desa Adat Kalibukbuk; <ul style="list-style-type: none"> • teridentifikasinya perubahan karakteristik sosial budaya dan tata ruang Desa Adat Kalibukbuk menentukan jenis serta arahan pelestarian 	desa adat biasa pada penelitian yang di lakukan Giri lebih pada pelestarian desa adat biasa bukan desa Bali aga serta terdapat hubungan dengan pariwisata.
3	Pelestarian Pola Tata Ruang Permukiman Tradisonal Desa Ubud, Kab. Gianyar. Siti Fatimah dalam Skripsi, Sarjana Universitas Brawijaya tahun 2006	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik sosial budaya masyarakat Ubud • Karakteristik pola tata ruang permukiman tradisonal desa Ubud • Arahan pelestarian pola tata ruang permukiman tradisonal desa Ubud 	<ul style="list-style-type: none"> • Desriptif Dan Analitis 	Desa Ubud, Kabupaten Gianyar Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya Karakteristik Soisal Budaya Masyarakat Desa Ubud • Teridentifikasinya pola tata ruang permukiman tradisonal Desa Ubud 	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan dengan studi saat ini yaitu terdapat pada tema dan focus wilayah studi desa adat biasa pada penelitian yang di lakukan Fatimah lebih pada pelestarian desa adat biasa bukan desa Bali aga (Kab. Gianyar), studi saat ini (Kab. Buleleng)

Lanjutan Tabel 2.2 Studi....

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Materi	Metode	Lokasi	Manfaat Penelitian	Perbedaan dengan Studi ini
4	Pola Penataan Unit Pekarangan di Desa Bongli Tabanan. I Made Adhika, Dosen Fakultas Teknik Arsitektur, Universitas Udayana dalam Jurnal Permukiman Natah Tahun 2004	<ul style="list-style-type: none"> • Tata ruang unit Pekarangan di Bali • Karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Bongli • Karakteristik pola penataan ruang unit pekarangan di Desa Bongli 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif 	Desa Bongli, Kabupaten Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya Karakteristik Soisal Budaya Masyarakat Desa Bongli • Teridentifikasinya pola pola penataan ruang unit pekarangan di Desa Bongli serta perubahah-perbahan tata ruang unit perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan dengan studi saat ini yaitu terdapat pada beda lokasi pada studi ini juga di kaji penguangi pola ruang permukimanya sedangkan pada penelitian yang di lakukan Adhika hanya pada pola hunian/pekarangan rumah.
5	Desa Adat Legian Di Tinjau Dari Pola Desa Tradisional Bali. Nengah Keddy Setiada, Dosen Fakultas Teknik Arsitektur, Universitas Udayana dalam Jurnal Permukiman Natah Tahun 2003	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik fisik Desa Adat Legian • Karakteristik pola Desa Adat Legian 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif 	Desa Adat Legian Kuta, Kabupaten Badung, Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya Karakteristik fisik Desa Adat Legian • Karakteristik pola Desa Adat Legian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dengan studi saat ini yaitu terdapat pada lokasi wilayah studi bukan merupakan desa Bali aga selain itu metode yang di gunakan hanya metode deskriptif.

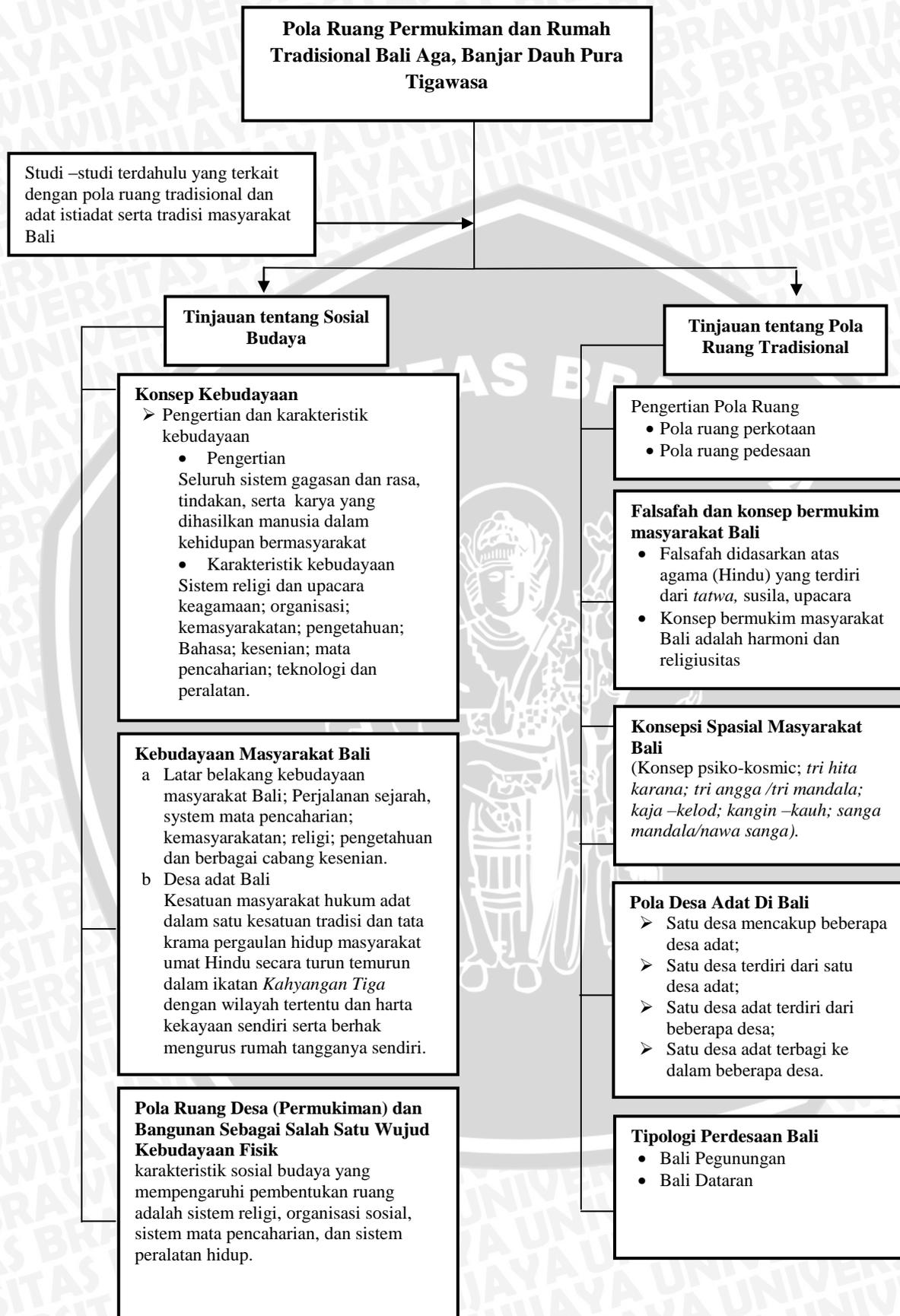
Lanjutan Tabel 2.2 Studi....

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Materi	Metode	Lokasi	Manfaat Penelitian	Perbedaan dengan Studi ini
6	Pelestarian Pola Ruang Permukiman Tradisional Suku Sasak Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur. Rina Sabrina dalam Skripsi, Sarjana Universitas Brawijaya tahun 2009 dalam Arsitektur e-journal 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik non fisik sosial budaya masyarakat Tradisional Suku Sasak Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur • Karakteristik fisik pola tata ruang permukiman Tradisional Suku Sasak Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif-Evaluatif (Observasi, Kuisisioner dan Wawancara) 	Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya karakteristik non fisik sosial budaya masyarakat Tradisional Suku Sasak Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur • Teridentifikasinya Karakteristik fisik pola tata ruang permukiman Tradisional Suku Sasak Dusun Limbungan Kabupaten Lombok Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan dengan studi saat ini yaitu terdapat pada lokasi wilayah studi serta temanya yaitu pelestarian sedangkan peneliti saat ini tidak terdapat arahan pelestarian
7	Pelestarian Pola Ruang Permukiman Masyarakat Using di Desa Kemiren Kabupaten Banyuangi. Tri Kurnia Hadi M. N dalam Skripsi, Sarjana Universitas Brawijaya tahun 2009 dalam Arsitektur e-journal 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik non fisik sosial budaya masyarakat Using di Desa Kemiren Kabupaten Banyuangi • Karakteristik fisik pola tata ruang permukiman Using di Desa Kemiren Kabupaten Banyuangi 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif – Eksploratif, Analisis Behavior dan Analisis Family Tree 	Desa Kemiren Kabupaten Banyuangi	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya karakteristik pola permukiman masyarakat Using 	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan dengan studi saat ini yaitu terdapat pada lokasi wilayah studi serta temanya yaitu pelestarian sedangkan peneliti saat ini tidak terdapat arahan pelestarian

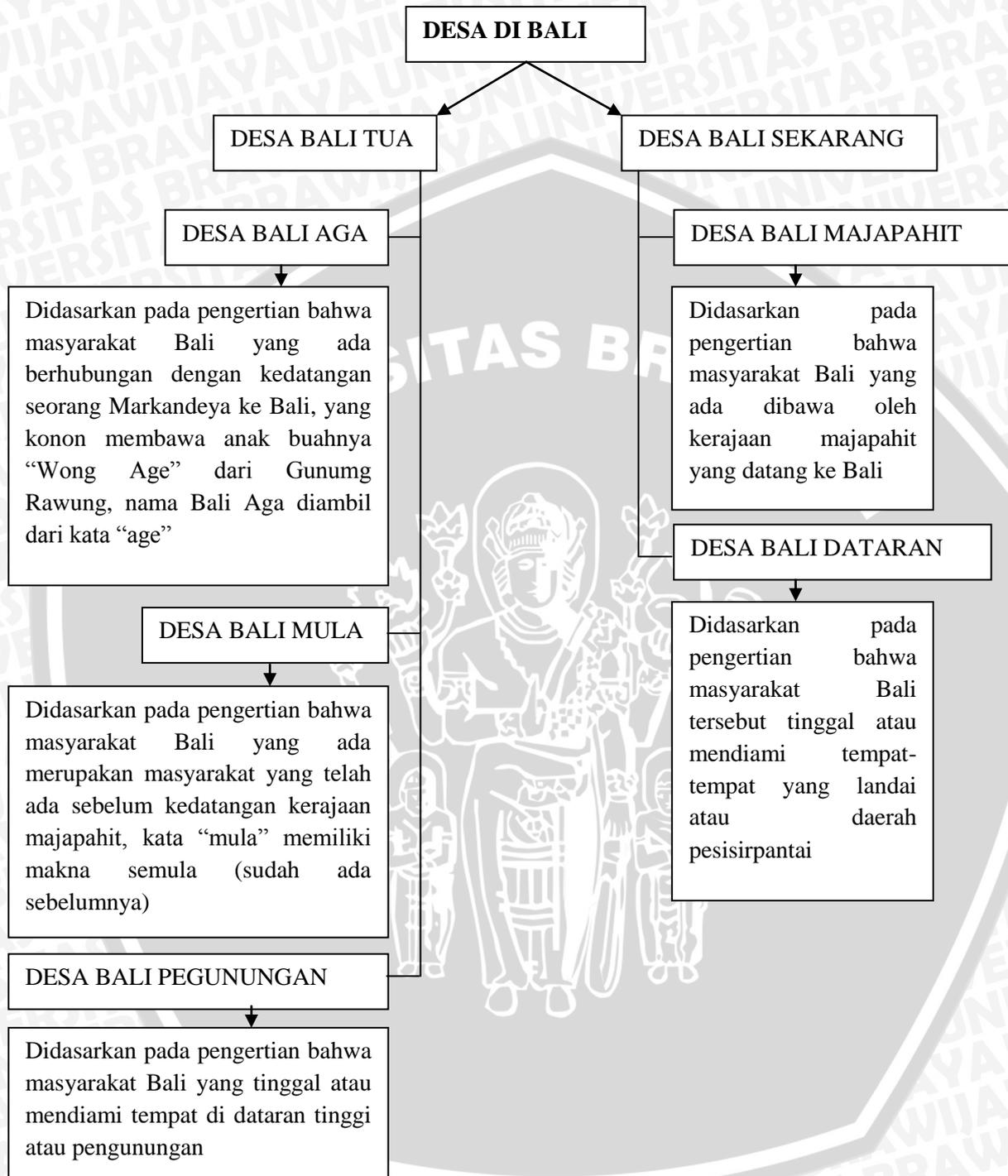
Lanjutan Tabel 2.2 Studi....

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Materi	Metode	Lokasi	Manfaat Penelitian	Perbedaan dengan Studi ini
8	Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar. Issana Meriana Burhan dalam Skripsi, Sarjana Universitas Brawijaya tahun 2009 dalam Arsitektur e-journal 2008	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik sosial budaya masyarakat Tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar • Karakteristik fisik pola tata ruang permukiman Tradisional Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif – evaluative (observasi lapangan, Kuisisioner, Wawancara, dan analisis data) 	Gampong Lubuk Sukon, Kabupaten Aceh Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya Karakteristik sosial budaya masyarakat • Teridentifikasinya Karakteristik Pola ruang yang terbentuk • Menganalisa pola ruang yang terbentuk akibat pengaruh sosial budaya masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan dengan studi saat ini yaitu terdapat pada lokasi wilayah studi
9	Pelestarian Pola Permukiman di Desa Adat Bayan Kabupaten Lombok Utara. Adhiya Harisanti Fitria dalam Skripsi, Sarjana Universitas Brawijaya tahun 2009 dalam Arsitektur e-journal 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Adat Bayan Kabupaten Lombok Utara. • Karakteristik fisik pola tata ruang permukiman Desa Adat Bayan Kabupaten Lombok Utara 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif – eksploratif 	Desa Adat Bayan Kabupaten Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya karakteristik pola permukiman di Desa Adat Bayan. • Teridentifikasinya permasalahan pelestarian pola permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • perbedaan dengan studi saat ini yaitu terdapat pada lokasi wilayah studi serta temanya yaitu pelestarian peneliti saat ini tidak terdapat arahan pelestarian

Sumber: Alit (2004), Giri (2008), Fatimah (2006), Adhika (2004), Setiada(2003), Kurnia (2009) Hadi M.N (2009), Burhan (2009), Fitria (2009), Sabrina (2009)



Gambar 2.8 Kerangka teori



Gambar 2.9 Skema difinisi desa di Bali

2.1.	Tinjauan Karakteristik Sosial Budaya	14
2.1.1.	Pengertian kebudayaan	14
2.1.2.	Unsur-unsur kebudayaan.....	15
2.1.3.	Latar belakang kebudayaan masyarakat Bali.....	18
2.2.	Tinjauan Karakteristik Pola Ruang Tradisional.....	20
2.2.1.	Pengertian pola ruang.....	20
2.2.2.	Pola ruang tradisional Bali	21
2.3	Falsafah dan Konsep Bermukim Masyarakat Bali	28
2.3.1.	Falsafah bermukim masyarakat Bali	28
2.3.2.	Konsep bermukim masyarakat Bali.....	29
2.3.3.	Morfologi pola permukiman desa.....	30
2.4	Desa Adat Di Bali	31
2.4.1.	Ciri – ciri desa adat.....	32
2.4.2.	Peranan desa adat	33
2.5	Pola Desa Adat di Bali	33
2.6	Tipologi Perdesaan Di Bali.....	35
2.6.1.	Desa Bali dataran.	35
2.6.2.	Desa Bali pegunungan (Bali Aga).	36
2.7	Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional	38
2.8	Studi-Studi Terdahulu	38
2.9	Kerangka Teori	39
2.10	Definisi Desa di Bali.....	39
Tabel 2.1. <i>Tri Hita Karana</i> dalam Susunan Kosmos		22
Tabel 2.2 Studi-studi Terdahulu terkait dengan Pola Ruang Permukiman Tradisional Bali Aga Desa Tigawasa Buleleng Bali		40

Gambar 2.1 Konsep Tri Angga/Tri Mandala dan Tri Hita Karana.	23
Gambar 2. 2 Konsep Arah Orientasi Ruang dan Konsep Sanga Mandala	24
Gambar 2.3 Konsep <i>Tri Angga</i> , sebagai konsep hirarki ruang.	25
Gambar 2.4 Konsep yang melandasi pola tata ruang tradisional Bali.	26
Gambar 2.5 Pola desa adat di Bali	34
Gambar 2.6 Ciri – ciri fisik desa Bali Dataran.	36
Gambar 2.7 Ciri – ciri fisik Desa Bali Pegunungan	37
Gambar 2.8 Kerangka teori	41
Gambar 2.9 Skema difinisi desa di Bali	41

